

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

4.1 Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2018** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 dan 2 terdiri dari 10 (sepuluh) indikator dimana ada indikator yang melebihi target ada yang sesuai target dan ada yang tidak mencapai target. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.541.010.185,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.478.826.461,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,55%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 62.183.724,-.

4.2 Hambatan dan Saran Perbaikan

Adapun hambatan atau kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih minimnya personil baik dari segi kuantitas dan kualitasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Umum, perlu diikutkan dalam diklat dan bimtek.
- b. Kendaraan dinas operasional (roda 4) yang ada belum memadai untuk menunjang kegiatan peninjauan/pemeriksaan lapang oleh bidang perijinan.
- c. Untuk penerbitan perijinan tertentu (IMB) terkesan lambat, karena harus ada rekomendasi dari SOPD teknis terkait yang lebih dahulu

melakukan survey lokasi dan tidak terkoordinir (masing-masing) sehingga perlu waktu yang cukup lama.

Untuk saran perbaikannya sebagai berikut :

- a. ASN yang ada saat ini dari segi kuantitas masih belum memadai sehingga perlu kiranya untuk menambah jumlah tenaga yang ada.
- b. Perlunya penambahan sarana untuk kelancaran pelaksanaantugas di lapangan terutama kendaraan operasional (roda 4).
- c. Koordinasi antar SKPD terkait perlu dibenahi agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Marabahan, 2018
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupatrn Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
NIP 19631127 199203 1 006